

BAB IV

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi System GMM pada 34 provinsi di Indonesia selama periode 2018–2023, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Gambaran umum kriminalitas di Indonesia menunjukkan pola fluktuatif antarprovinsi, dengan provinsi yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan permasalahan sosial-ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran, cenderung mencatat tingkat kriminalitas lebih tinggi.
- b. Tingkat kriminalitas pada tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas tahun berjalan, menunjukkan adanya persistensi kriminalitas.
- c. Tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, yang berarti semakin tinggi kemiskinan, semakin besar potensi tindak kriminal.
- d. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan, berlawanan dengan hipotesis, kemungkinan dipengaruhi variabel antara seperti sektor informal atau mobilitas sosial.
- e. Tingkat ketimpangan pendapatan (Gini ratio) berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sehingga tidak secara langsung memengaruhi tingkat kriminalitas.
- f. Tingkat kepadatan penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan, sesuai arah hipotesis tetapi tidak cukup kuat secara statistik.
- g. PDRB per kapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sesuai arah hipotesis tetapi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat kriminalitas antarprovinsi.
- h. IPM berpengaruh positif dan signifikan, berlawanan arah dengan hipotesis negatif, kemungkinan karena wilayah dengan IPM tinggi memiliki sistem pelaporan kriminalitas yang lebih baik.

5.2 Implikasi

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku pembangunan sosial di Indonesia. Pertama, sifat persisten dari kriminalitas (lag kriminalitas) menegaskan bahwa kebijakan pengendalian kejahatan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan jangka panjang, bukan hanya bersifat reaktif. Kedua, pengaruh signifikan kemiskinan terhadap kriminalitas menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga dapat menekan potensi tindak kriminal. Ketiga, meskipun IPM berpengaruh positif dan signifikan, arah hubungannya berlawanan dengan hipotesis negatif awal, sehingga pencapaian pembangunan manusia perlu diiringi dengan penguatan sistem pelaporan kejahatan, literasi hukum, dan pengawasan terhadap jenis kriminalitas yang lebih kompleks.

Selain itu, variabel seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, kepadatan penduduk, dan PDRB yang tidak signifikan menunjukkan bahwa pengendalian kriminalitas tidak dapat hanya bergantung pada faktor ekonomi makro atau kepadatan penduduk, melainkan perlu pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual sesuai karakteristik tiap provinsi.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan implikasi penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

- a. Bagi Pemerintah & Penegak Hukum
 Pemerintah perlu memperkuat program penanggulangan kemiskinan yang terarah dan berbasis komunitas untuk mengurangi tekanan ekonomi yang berpotensi mendorong tindak kriminal, dengan mengintegrasikan pelatihan keterampilan kerja dan peningkatan inklusi ekonomi. Di sisi lain, lembaga penegak hukum dan pembuat kebijakan perlu meningkatkan kapasitas sistem pelaporan kejahatan, terutama di daerah dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap kejahatan modern seperti penipuan daring dan kejahatan kerah putih.
- b. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif melalui peningkatan kesadaran hukum, partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, serta pengawasan sosial berbasis komunitas. Edukasi mengenai risiko dan bentuk kejahatan modern, seperti penipuan daring, juga penting untuk meningkatkan literasi digital dan mencegah masyarakat menjadi korban maupun pelaku kejahatan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih lanjut keterkaitan antara variabel sosial lainnya seperti kepercayaan terhadap institusi hukum, partisipasi sosial, atau akses terhadap keadilan dalam menjelaskan variasi kriminalitas. Penelitian selanjutnya juga bisa melihat dampak jangka panjang dan menggunakan data wilayah atau data individu agar hasilnya lebih detail dan mendalam

5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, keterbatasan pada cakupan variabel, di mana model hanya mencakup faktor-faktor ekonomi, sementara faktor non-ekonomi seperti kualitas institusi, kepercayaan publik, dan tingkat urbanisasi belum dimasukkan, padahal faktor-faktor tersebut juga berpotensi memengaruhi tingkat kriminalitas. Kedua, data yang digunakan bersifat agregat pada tingkat provinsi, sehingga tidak dapat menggambarkan dinamika kriminalitas secara lebih rinci di tingkat individu atau rumah tangga. Ketiga, metode System GMM yang digunakan dalam penelitian ini cenderung hanya menangkap hubungan linier jangka pendek, sehingga belum mampu mengakomodasi hubungan non-linier maupun efek interaksi atau moderasi antarvariabel secara lebih mendalam.